



**SUMBER BERITA**

**JUMAT, 27 DESEMBER 2019**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Dua TSK Korupsi DKP Kota**

**Awal Tahun Ditetapkan**

**BENGKULU** - Pengusutan dugaan korupsi pada kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bengkulu tahun anggaran 2018 senilai Rp 951 juta, memasuki babak akhir. Penyidik Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Bengkulu sudah mendapatkan dua tersangka dalam kasus ini. Bila tak ada kendala awal tahun 2020 dilakukan ekspose dan penetapan secara resmi tersangka.

Siapa saja tersangka itu? Sejauh ini Polres Bengkulu belum mau menyebutkan identitasnya sebelum resmi ditetapkan. Hanya saja sebagai gambaran, dua tersangka ini sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas saksi.

Kapolres Bengkulu, AKBP Pahala Simanjuntak SIK melalui Kasat Reskrim AKP Indramawan Kusuma Trisna, S.IK membenarkan penyidikan yang dilakukan sudah memasuki tahap final. Saat ini tinggal menunggu keluarnya hasil audit kerugian negara dari BPKP Provinsi Bengkulu. Setelah itu, pe-

nyidik segera melakukan ekspose dan penetapan tersangka. Dimana saat ini pun terus melakukan kordinasi dengan BPKP untuk melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh auditor. Selain itu, pihaknya telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, dan didapati gambaran tersangka.

"Ya untuk DKP Kota kita masih menunggu hasil audit kerugian negara keluar, jadi kita lanjutkan di awal tahun 2020 mendatang. Semoga awal tahun sudah keluar sehingga bisa masuk ke babak akhir, penetapan tersangka,"

ungkap Indramawan yang belum mau menyebutkan gambaran tersangka. "Tunggu saja ya, yang jelas untuk tersangka adalah orang-orang yang berhak bertanggung jawab atas perkara ini," imbuhnya.

Untuk diketahui, anggaran pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bengkulu senilai Rp 951 juta. Pekerjaan proyek itu tidak selesai tepat waktu meski sudah diberikan perpanjangan waktu. Selain itu juga, spesifikasi pengerjaan

yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Selama pekerjaan berlangsung, kontraktor telah mencairkan dana Rp 666,380 juta dalam dua kali termin. Adapun bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan baru mencapai 51,01 persen sebagaimana hasil pemeriksaan fisik oleh ahli independen dari Unihaz. Kekurangan volume pekerjaan ini berpotensi merugikan keuangan negara. Berapa besar kerugian negara? Itu yang saat ini masih dilakukan penghitungan atau audit oleh BPKP Provinsi Bengkulu. (cup)